

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arba, 2016, *Hukum Agrarian Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Agus Suntoro, 2018, *Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta

Dahlan Thaib, Jazim Hamii, Ni'matul Huda, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Isnaini Danangreni Lubis, 2022, *Hukum Agrarian Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan

I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Panji Sakti, Buleleng

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini. Muljadi dan Gunawan widjaja, 2007, *Hak Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Agraria*, Reka Cipta, Bandung

Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga kajian konstitusi Indonesia, Banda Aceh

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta



Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, solo

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo Jawa Tengah

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Wali Ps, Jakarta

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Bantul-Jogjakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung

Tody Sasmitha Haryo Budhiawan Sukayadi, 2014, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agrarian*, STPN Press, Yogyakarta

Willius Kogoya, 2015, *Teori Dan Ilmu Konstitusi*, Widina Bhakti Persada, Bandung, JawaBarat



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Guna Bangunan, dan Hak Pakai

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perizinan, Kemudahan Berusaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas pengujian Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutan

D. Jurnal

Andi Bustamin Daeng Kunu, 2012, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1

Akhmad Zulkifli, 2019, “*The Legal Analyzes The Concept Of The Right To Control The State Of Natural Resources At Sea In The Jurisdiction Of Indonesia*”, Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 9 No.2

Aisyah Syafa Carolina, Teza Salih Mauludin dan Meiza Hafilda, 2022, “Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) Untuk Badan Hukum Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”, Jurnal Hukum *Lex Generalis*. Volume 3 No.9

Afifah Kusumadara, 2013, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki”, Jurnal Media Hukum, Volume 20 No.2

Aprillia Wahyuningsih, 2022, “Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan”, Jurnal UII, Volume 7 No 4

Bhakti Eko Nugroho, 2022, “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pindahan Ibukota Negara”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Volume 6 No 1

Bernica Angelina, 2023, “Analisa Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Atas Penggunaan Tanah Di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal Dan Peraturan Dasar Pokok Agrarian”, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Volume 1 No.8

Dara Salsabila, 2024, "*Degradation Of Cultivation Rights Of Oil Palm Plantations Indicated To Overlap With The Designation Decree Of Forest Area*", Jurnal Pertanahan, Volume 14 No 2,

Elin Setiawati dan Lego Karjoko, 2022, "Keabsahan Peraturan Walikota Surakarta No. 12A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bansos dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", Jurnal Discretie, Volume 3, No.1

Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah", Jurnal Majalah Hukum Nasional, Volume 52 No.1

Felishella Earlene dan Tundjung HERNING Sitabuana, 2024, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM", Jurnal Tunas Agraria, Volume 7 No 2

C.P.F.Harun Fadhli, Et.Al., 2021, Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold, Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, Volume 5 No 2

Masyrullahushomad Sudrajat, 2019, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa", Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Volume 7 No.2

Maruarar Siahaan, 2010, "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan", Jurnal Konstitusi, Volume 7 No.4

Muhammad Adrian Rizaldi dan Hamid Chalid, 2023, "Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Memberikan Persetujuan Untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris", Jurnal Unes Law Review, Volume 6 No.2

Otti Ilham Khair, C.P.F. Et. Al. 2010, "Penerapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan Konflik Lahan di Ibu Kota Negara Baru", Jurnal Rectum, Volume 5 No.2

- Rikardo Simarmata, 2023, “Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No 1,
- Reka Gusnaeni, 2023, “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru”, *Journal of Constitutional Law*, Volume 3 No 3
- Richard Jatimulya Alam Wibowo, 2022, “Pengadaan Tanah Di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria”, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Volume 52 No.1
- Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, 2022, “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 13 No.2
- Sumral Buru Manoe, 2014, “Konstruksi Hak Menguasai Negara dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2
- Ruslan, 2021, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli)”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 1 No 3 hlm 82
- Virna Septia Anggyamurni Yusya Rugaya Salsabilah dan Ewaldo Duta Salsa, 2020, “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Pemaharuan Hukum Islam*, Volume 23 No.2

E. Skripsi/Makalah

- Aditya Krisna Murti, Nawang Wulan, Andre Bagus Saputra, 2023, “Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara”, prosiding seminar hukum actual fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Alif Sabastian Vito Wiyarta, 2024, Keabsahan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Oleh Keanggotaan Polri Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 dan Perspektif Siyāsah Dusturiyah, Skripsi, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang

Indah Angraini Novitasari, 2023, “Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Di Wilayah Ibu Kota Nusantara”, skripsi Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya

Nana Supena, 2018, “Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sabiq Carebesth dan Syaiful Bahari, 2012, “Kebijakan Agrarian Berbau Kolonial”, Policy Paper Bina Desa

F. Internet

Aditya Khrisna Murti, “*Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembeban Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara*”, <https://urnal.uui.ac.id/psha/article/view/30955>.

Aliansi masyarakat adat nusantara, “masyarakat adat di tahun politik ditengah hukum represif dan cengkraman oligarki”, <file:///C:/Users/User/Downloads/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20LYTD.pdf>,

Diyah Ratu Sari Harahap, “*Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dalam Pengaturan Penanganan Fakir Miskin*”, <http://repository.unas.ac.id/262/>

Direktorat Jendral Keuangan Negara, “*Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-undangan*”, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca->

artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html&ved=2ahUKEwiO55HFo5WMAxWO1TgGHd1aI4gQFnoECDQQAQ&usg=AOvVaw15A0jcaO1OsXOyVeJ-vqIW

Hukum Online, “*Hak Konstitusional Warga Negara*”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>

Hukum online, “*Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat-lt4f1654e73aad1/>,

Hukum Online, “*Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*”,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/?utm_source=chatgpt.com,

Konsorsium Pembaruan Agrarian, “*Konflik Negara di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia*”, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/#:~:text=Dewi%20Kartika%2C%20Sekretaris%20Jenderal%20Konsorsium,Ombudsman%20dan%20parlemen%2C%2E2%80%9D%20katanya>,

Kumparan News, “*Warga Dayak Gugat UU IKN ke MK: Penggunaan Hak Tanah 80-95 Tahun Terlalu Lama*”,
<https://kumparan.com/kumparannews/warga-dayak-gugat-uu-ikn-ke-mk-penggunaan-hak-tanah-80-95-tahun-terlalu-lama-24dGIBmTPwC/2>

Kemendikbud, “*Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan Yang Baik*”,
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php%3Farticle%3D1528690%26val%3D1511%26title%3DTinjauan%2520tentang%2520Ruang%2520Lingkup%2520dan%2520Alat%2520Ukur%2520Tindak%2520Pemerintahan%2520yang%2520Baik&ved=2a>

hUKEwjtlcLnkpWMAxUfyDgGHWAcl5kQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw0UN2wdXcmH4vUh7w8EcUk_

Mukmin Zakie, “*Hak Guna Usaha Dan Problematikanya di Indonesia*”,
[Prosiding Seminar Nasional, “*Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanahan*”,
<http://repository.stpn.ac.id/227/1/14%20Rekonstruksi%20Pemberian%20Hak%20Guna%20Usaha%20Di%20Atas%20Tanah.pdf>](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flaw.uui.ac.id%2Fhak-guna-usaha-hgu-dan-problematikanya-di-indonesia%2F&psig=AOvVaw1FIQwmxoqo6hVegR9lJSkT&ust=1735988827742000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiI-Y__tNmKAxUAAAAAHQAAAAAQBA,”</p></div><div data-bbox=)

Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme*”,
[Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antar pulau*”,
\[Sofia Rahmawati, “*Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha*”
<https://rnal.instiperjogja.ac.id/index.php/PRO/article/download/237/208/1013>\]\(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/&ved=2ahUKEwjdiMHfsqaKAxXi1zgGSHGASMQFnoECBUQAw&usg=AOvVaw2NQV3ezLFDYPd7spx0hibc</p></div><div data-bbox=\)](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%2520Yuliandri_Konstitusi%2520dan%2520Konstitusionalisme_Makalah.pdf&ved=2ahUKEwjPkLXAnZWMAxXT2TgGHdefNGUQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0W6DsJSTjn12mTWoqLe_Q5,”</p></div><div data-bbox=)

Tempo, “*Perampasan Lahan Masyarakat Adat Demi Pembangunan IKN*”,
https://youtu.be/dV8meQ69R_Y?feature=shared.”

Tempo, “Berapa Luas Negara Indonesia”,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.tempo.co/sains/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjasannya>

205247&ved=2ahUKEwjtfnCzbOKAxWLzDgGHX3WNi8QFnoECEIQAQ&usg=AOvVaw0DENUOzy_odMUd7BUBtiEd.

Tempo, Intip Pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro di Kawasan Adat Muara Langkap Jambi, <https://www.tempo.co/foto/arsip/intip-pembangunan-plta-kerinci-merangin-hidro-di-kawasan-adat-muara-langkap-jambi-277362>

